

**PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI WAKA
DESA FATKAUYON KECAMATAN SULABESI TIMUR KABUPATEN
KEPULAUAN SULA**

Zulfikar fernatubun, Andiah Nurhaeny, Rifyan Ruman
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pattimura Ambon
e-mail: Zulfikarfernatusun10@gmail.com

ABSTRAK

Wisata Pantai Waka dikelola oleh Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan kelompok sadar wisata Basanohi terdapat temuan bahwa kurangnya sosialisasi dan fungsi kontrol dari kelembagaan pada program pengembangan kawasan wisata pantai waka di Desa fatkauyon dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar dan rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal (keterbatasan sumber daya manusia yang handal dalam pengembangan pariwisata) selain itu kurangnya peran kelembagaan sebagai fasilitator dalam kerja sama dan perhatian dari kelembagaan sehingga terdapat kurangnya perawatan terhadap infrastruktur yang telah tersedia, serta kurangnya perhatian atau kerja sama dengan para stakeholders. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 35 responden yang terdiri dari 10 orang dari wisatawan, 5 orang dari kelompok sadar wisata, 15 orang dari unsur masyarakat desa fatkauyon dan 5 orang dari unsur pemerintah baik dari dinas pariwisata dan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan Analisis SWOT, untuk mengkaji dampak peran kelembagaan terhadap pengembangan kawasan wisata dan strategi yang harus dilakukan kelembagaan untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Wisata Pantai Waka. Berikut stakeholder yang terlibat dalam pengembangan Wisata Pantai Waka Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula diklasifikasikan menjadi 5 elemen yang tergabung diantaranya Dinas pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula, Pemerintah Desa Fatkauyon, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, Kelompok sadar wisata (pokdarwis) basanohi. (Disversifikasi Strategi) strategi yang dapat digunakan Berdasarkan hasil perhitungan SWOT agar mendukung pengembangan Wisata Pantai Waka di Desa fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula.

Kata Kunci: peran kelembagaan, pengembangan kawasan wisata, wisata pantai

ABSTRACT

Waka Beach Tourism is managed by the Tourism Office in collaboration with the Basanohi tourism awareness group. There are findings that the lack of socialization and control function of the institution in the waka beach tourism area development program in Fatkauyon Village and the benefits are less felt by the surrounding community and the low quality of local human resources (limited reliable human resources in tourism development) in addition to the lack of institutional roles as facilitators in cooperation and attention from institutions so that there is a lack of maintenance of existing infrastructure, as well as a lack of attention or cooperation with stakeholders. The number of respondents in this study was 35 respondents consisting of 10 people from tourists, 15 people from the Fatkauyon village community and 5 people from government elements both from the tourism office and the village government. This study uses a qualitative descriptive approach and SWOT Analysis, to examine the impact of institutional roles on the development of tourism areas and strategies that institutions must carry out to improve the development of the Waka Beach Tourism Area. The following stakeholders

involved in the development of Waka Beach Tourism in Fatkauyon Village, East Sulabesi District, Sula Islands Regency are classified into 5 elements which are included in the Sula Islands Regency Tourism Office, Fatkauyon Village Government, Public Works and Spatial Planning Office, Sula Islands Regency Bappeda, Basanohi Tourism Awareness Group (Pokdarwis). (Diversification Strategy) strategies that can be used Based on the results of SWOT calculations to support the development of Waka Beach Tourism in Fatkauyon Village, East Sulabesi District, Sula Islands Regency.

Keywords: *institutional roles, tourism area development, coastal tourism*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya. Banyak penelitian menyebutkan bahwa sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai sarana pemerataan pembangunan melalui terciptanya kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi baru (Ginting et al., 2020; Rinaldi & Hema, 2024). Pada negara berkembang seperti Indonesia, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta mencegah perpindahan penduduk desa ke kota melalui penyediaan aktivitas ekonomi produktif di daerah asal (Nandi, 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, arah pembangunan pariwisata nasional mengalami pergeseran menuju pengembangan berbasis masyarakat melalui model desa wisata, ekowisata, dan wisata bahari yang lebih menekankan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal (Triyono & Nugroho, 2023; Nugroho et al., 2022). Pergeseran ini menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh daya tarik alam saja, tetapi juga oleh kualitas tata kelola destinasi, salah satunya melalui kelembagaan yang berfungsi mengatur, mengoordinasi, dan mengarahkan pemangku kepentingan dalam kegiatan pariwisata (Handayani & Warsono, 2017; Sari & Kagungan, 2016).

Dalam konteks pembangunan pariwisata, kelembagaan memiliki peran fundamental sebagai pilar yang mengatur pemanfaatan sumber daya, mengelola distribusi manfaat, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengembangan destinasi (Hidayat & Muchtar, 2022). Berbagai studi menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat mendorong efektivitas pengembangan destinasi, meningkatkan kualitas atraksi wisata, dan memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar (Ikhlās & Agustar, 2024; Syaifudin & Ma'ruf, 2022). Kelembagaan juga menjadi mediator dalam membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan wisatawan, sehingga mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan oleh Habaora et al. (2021), keberadaan struktur organisasi yang jelas dan sistem pengelolaan yang partisipatif berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan, aksesibilitas, dan kelayakan fasilitas pada destinasi wisata. Dengan demikian, penguatan kelembagaan bukan hanya aspek administratif, tetapi merupakan faktor kunci dalam menciptakan daya saing destinasi.

Kabupaten Kepulauan Sula merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011–2031 serta Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab), kawasan Sulabesi ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dengan titik pusat layanan utama di Kecamatan Sulabesi Timur. Salah satu destinasi unggulan di kawasan tersebut adalah Wisata Pantai Waka, yang memiliki atraksi berupa terumbu karang, habitat penyu, kegiatan snorkeling dan

diving, serta hamparan pasir putih yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Keberadaan fasilitas pendukung seperti gazebo, toilet, warung makan, hingga persewaan alat snorkeling dan diving pada awalnya menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata bahari yang kompetitif (Alfianor et al., 2020; Simamora & Sinaga, 2016). Namun, potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Meskipun memiliki potensi yang besar, hasil temuan awal menunjukkan bahwa pengelolaan Wisata Pantai Waka belum berjalan optimal. Berbagai persoalan kelembagaan ditemukan di lapangan, seperti kurangnya sosialisasi program pariwisata kepada masyarakat, lemahnya fungsi koordinasi, serta tidak efektifnya mekanisme kontrol dari pihak pengelola. Kondisi ini terlihat dari belum tersedianya area parkir yang memadai, keterbatasan akses listrik dan jaringan telekomunikasi di kawasan wisata, serta minimnya fasilitas kebersihan seperti tempat sampah yang layak. Persoalan ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa lemahnya kelembagaan sering kali menjadi salah satu hambatan utama bagi destinasi wisata dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan (Suryaningsih & Nugraha, 2018; Wahyuningsasi, 2022). Ketika kelembagaan tidak berfungsi secara optimal, maka proses pengembangan destinasi menjadi tidak terarah dan dampaknya terhadap perekonomian lokal menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya *gap* antara potensi Wisata Pantai Waka yang begitu besar dan kualitas pengelolaan yang belum sesuai standar destinasi unggulan. Apabila persoalan kelembagaan tidak diatasi, maka keberlanjutan destinasi akan sulit dicapai, bahkan dapat menimbulkan degradasi lingkungan dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, yaitu untuk menganalisis peran kelembagaan dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Waka serta bagaimana kontribusi kelembagaan tersebut dalam mendukung efektivitas pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, kelompok sadar wisata, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi penguatan kelembagaan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata Pantai Waka. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui proses identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pengembangan wisata, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi instansi terkait, laporan lembaga pemerintah, publikasi media daring, serta literatur akademik yang mendukung fokus penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 35 orang yang mewakili berbagai elemen penting dalam pengembangan wisata Pantai Waka. Informan tersebut meliputi: 10 wisatawan, 5 anggota Kelompok Sadar Wisata, 15 masyarakat Desa Fatkauyon, serta 5 informan dari unsur pemerintah, baik dari Dinas Pariwisata maupun pemerintah desa. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengembangan wisata.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terarah untuk menggali informasi mengenai peran stakeholder, kepentingan masing-masing pihak, dan dinamika

hubungan antar-stakeholder dalam proses pengembangan wisata. Observasi dilakukan guna mencatat kondisi aktual di lapangan serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap berupa foto, arsip, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan wisata. Analisis SWOT digunakan untuk memetakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) sehingga dapat dirumuskan strategi pengembangan yang lebih tepat dan relevan berdasarkan kondisi lapangan dan karakteristik para pemangku kepentingan.

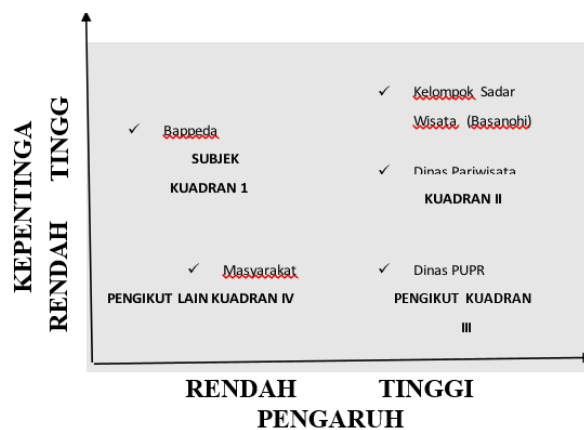
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Gambar 1 menunjukkan posisi geografis Pantai Waka yang berada di Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur. Peta ini memperjelas konteks spasial objek wisata yang diteliti, sekaligus menggambarkan keterhubungan kawasan dengan pusat permukiman, akses transportasi, dan wilayah administratif lainnya.



Gambar 2. Pemetaan Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata

Gambar 2 menampilkan struktur relasi para pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, kelompok sadar wisata, hingga masyarakat dan pihak pendukung lainnya. Peta ini memperlihatkan letak strategis tiap aktor dalam rantai pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi. Visualisasi tersebut membantu memahami bagaimana arus informasi dan koordinasi bergerak serta titik lemah yang berpotensi menghambat pengembangan kawasan.

Tabel 1. Perhitungan Matriks IFAS

No.	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Bobot	Rating	Skor
1.	Regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung wisata Pantai Waka	0,14	4,13	0,56
2.	Koordinasi antar Lembaga dalam pengelolaan wisata Pantai Waka	0,14	4,33	0,62
3.	Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata Pantai Waka	0,13	4,00	0,53
4.	Promosi wisata yang dilakukan oleh lembaga terkait	0,14	4,33	0,62
	Sub Total	0,55		2,32
No.	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Bobot	Rating	Skor
1.	Minimnya koordinasi antara pemerintah dan pengelola wisata Pantai Waka	0,12	3,70	0,45
2.	Kurangnya anggaran untuk pengelolaan wisata Pantai Waka	0,11	3,20	0,34
3.	Kurangnya edukasi tentang pengembangan wisata serta kebijakan yang tidak konsisten dalam pengelolaan wisata Pantai Waka	0,11	3,23	0,34
4.	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	0,12	3,53	0,41
	Sub Total	0,45		1,54
	TOTAL	1		4,31

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui rating masing-masing faktor internal yaitu kekuatan (*S*) berkisar antara 4,00 yang paling rendah sampai 4,33 paling tinggi, sedangkan untuk faktor kelemahan (*W*) berkisar antara 3,20 paling rendah dan 3,70 adalah rating tertinggi. Rating kekuatan dari 8 pernyataan faktor diberi nilai 4 berarti indikator kinerja semakin baik. Pemberian nilai rating untuk faktor kekuatan bersifat positif (kekuatan yang semakin besar diberi rating 4 tetapi jika kekuatannya kecil diberi rating 1). Pemberian nilai rating kelemahan adalah kebalikannya. Jika kelemahannya sangat besar, ratingnya adalah 1, tetapi jika kelemahannya sedikit nilai ratingnya 4.

Tabel 2. Perhitungan Matriks FAS

No.	Peluang (<i>O</i>)	Bobot	Rating	Skor
-----	----------------------	-------	--------	------

1.	Kemitraan dengan pihak swasta untuk pengelolaan wisata	0,14	3,63	0,46
2.	Potensi wisata yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara	0,14	4,07	0,58
3.	Meningkatkan pendapatan masyarakat desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur	0,14	3,93	0,54
4.	Perkembangan teknologi untuk promosi digital	0,15	4,23	0,62
Sub Total		0,55		2,20
No.	Ancaman (T)	Bobot	Rating	Skor
1.	Bencana alam dan dampak perubahan iklim	0,10	2,97	0,31
2.	Persaingan dengan wisata yang lain	0,09	2,60	0,24
3.	Kerusakan lingkungan akibat wisata yang tidak terkendali	0,14	4,13	0,60
4	Kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan pantai	0,11	3,13	0,34
Sub Total		0,45		1,48
TOTAL		1,00		4,31

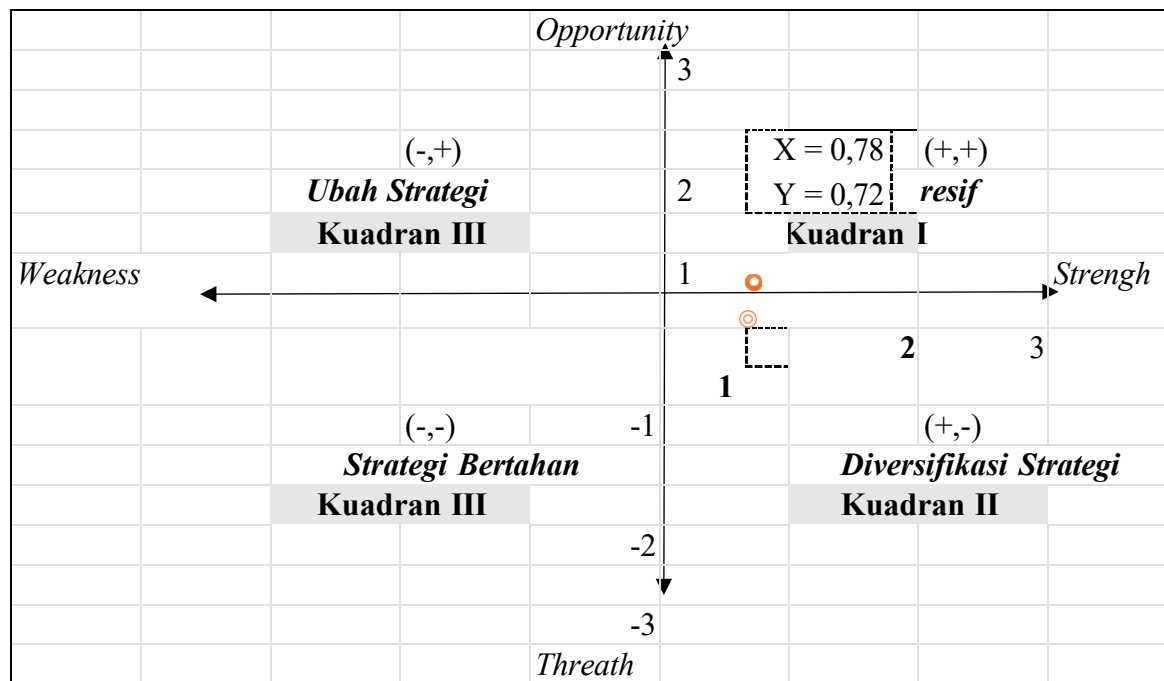
Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui rating masing-masing faktor eksternal yaitu Peluang (*O*) berkisar antara 3,63 yang paling rendah sampai 4,23 paling tinggi, sedangkan untuk factor ancaman (*T*) berkisar antara 2,60 paling rendah dan 4,13 adalah rating tertinggi. Rating kekuatan dari 8 pernyataan faktor diberi nilai 4 berarti indikator kinerja semakin baik. Pemberian nilai rating untuk faktor kekuatan bersifat positif (kekuatan yang semakin besar diberi rating 4 tetapi jika kekuatannya kecil diberi rating 1). Pemberian nilai rating kelemahan adalah kebalikannya. Jika kelemahannya sangat besar, ratingnya adalah 1, tetapi jika kelemahannya sedikit nilai ratingnya 4.

Tabel 3. Hasil Perhitungan SWOT

Faktor Internal	Faktor Eksternal
x = Kekuatan – Kelemahan	y = Peluang - Ancaman
x = 2,32 – 1,54	y = 2,20-1,48
x = 0,78	y = 0,72

Tabel 3 menampilkan posisi strategi Pantai Waka dalam kerangka SWOT. Nilai akhir menunjukkan bahwa destinasi berada pada kuadran I, yang berarti berada dalam kondisi ideal

untuk menerapkan strategi agresif atau progresif. Artinya, kekuatan internal dan peluang eksternal dapat dimaksimalkan secara bersamaan dalam mendorong percepatan pengembangan wisata.



Gambar 3. Matriks Grand Strat

Gambar 3. Matriks Grand Strategy menggambarkan posisi strategis pengembangan Wisata Pantai Waka berdasarkan nilai total faktor internal (*Strength–Weakness*) dan faktor eksternal (*Opportunity–Threat*). Titik koordinat hasil analisis, yaitu $X = 0,78$ (kekuatan lebih dominan daripada kelemahan) dan $Y = 0,72$ (peluang lebih besar daripada ancaman), menempatkan Pantai Waka secara jelas pada Kuadran I. Posisi ini menunjukkan bahwa destinasi memiliki modal internal yang kuat dan didukung lingkungan eksternal yang kondusif untuk pertumbuhan.

Tabel 4. Matriks SWOT Pengembangan Wisata Pantai Waka

Aspek	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan kebijakan pemerintah mendukung pengembangan wisata Pantai Waka. - Koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan wisata Pantai Waka. - Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengembangan wisata. - Promosi wisata dilakukan oleh lembaga terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya koordinasi antara pemerintah dan pengelola wisata Pantai Waka. - Kurangnya anggaran untuk pengelolaan wisata. - Kurangnya edukasi terkait pengembangan wisata dan inkonsistensi kebijakan pengelolaan. - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Aspek	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Aspek	Peluang (Opportunities)	Strategi SO (Strength– Opportunity) Strategi WO (Weakness– Opportunity)
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan dengan pihak swasta untuk pengelolaan wisata. - Potensi wisata yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. - Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Fatkayuon, Kecamatan Sulabesi Timur. - Perkembangan teknologi untuk promosi digital. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah, swasta, dan masyarakat bekerja sama mengembangkan menyusun paket wisata aksesibilitas menuju Pantai Waka. 2. Kerja sama pemerintah, swasta, dan instansi terkait masyarakat. 2. Menyediakan dalam penyediaan sarana amenitas wisata secara dan prasarana wisata. 3. terpadu sebagai desa wisata Mengontrol hewan ternak Pantai Waka. 3. Memperkuat agar kebersihan dan kerja sama dalam keasrian kawasan wisata meningkatkan kinerja tetap terjaga. Kelompok Sadar Wisata.
Aspek	Ancaman (Threats)	Strategi ST (Strength– Threat) Strategi WT (Weakness– Threat)
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Bencana alam dan dampak perubahan iklim. - Persaingan dengan destinasi wisata lain. - Kerusakan lingkungan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali. - Kurangnya kesadaran wisatawan menjaga kebersihan pantai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengembangan Pantai Waka sebagai objek ekowisata berkelanjutan membangun aksesibilitas, yang menjaga lingkungan amenitas, dan atraksi dengan dan melibatkan semua pemangku kepentingan. 2. keberlanjutan lingkungan, Kerja sama masyarakat keunikan budaya, setempat untuk menjaga pemerataan manfaat, serta sumber daya lingkungan aspek kesehatan. sesuai aturan adat/budaya.

Tabel 4 menggambarkan kombinasi strategi yang dapat diambil berdasarkan faktor S-O, W-O, S-T, dan W-T. Matriks ini menyediakan dasar untuk menyusun program konkrit seperti peningkatan promosi digital, pembangunan aksesibilitas bersama pemerintah dan swasta, dan penguatan kelembagaan desa melalui pelatihan SDM.

Pembahasan

Kondisi Eksisting Wisata Pantai Waka

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa Pantai Waka memiliki karakteristik bentang alam pesisir yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Keindahan pasir putih, kontur pantai yang landai, serta perairan yang masih relatif jernih memberikan nilai estetika yang kuat bagi wisatawan. Keberadaan ekosistem terumbu karang dan habitat penyu yang masih terjaga di beberapa titik menjadikan kawasan ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai wisata bahari berbasis konservasi. Hal ini sejalan dengan temuan Habaora et al. (2021) yang menegaskan bahwa kualitas ekosistem alam merupakan salah satu elemen dasar dalam penentuan daya tarik wisata.

Meskipun potensi alamnya cukup besar, kondisi eksisting memperlihatkan bahwa

kawasan ini masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar. Fasilitas umum seperti gazebo, toilet umum, hingga area istirahat masih belum dikelola secara optimal dan tampak kurang terawat. Tidak tersedianya area parkir resmi yang memadai menjadi kendala bagi kenyamanan wisatawan, terlebih pada musim kunjungan tinggi. Minimnya jaringan listrik dan telekomunikasi juga menghambat aktivitas wisatawan, terutama bagi wisatawan generasi muda yang sangat bergantung pada akses internet selama berwisata. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih terjadi kesenjangan antara potensi sumber daya alam dengan kesiapan sarana prasarana pendukung wisata, sebagaimana juga ditemukan pada penelitian serupa (Simamora & Sinaga, 2016).

Selain itu, kualitas kebersihan kawasan juga masih menjadi isu penting. Minimnya pengadaan tempat sampah menyebabkan beberapa titik wisata tampak kurang terjaga kebersihannya. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya mekanisme pengelolaan sampah terpadu berbasis kelembagaan desa atau Pokdarwis. Penelitian Suryaningsih & Nugraha (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat hanya dapat optimal jika aspek kebersihan dan lingkungan dikelola melalui peran kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, kondisi eksisting Pantai Waka menunjukkan bahwa potensi alam yang besar belum didukung oleh tata kelola yang memadai.

Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Wisata Pantai Waka

Hasil pemetaan stakeholder memperlihatkan bahwa struktur tata kelola destinasi telah melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan Bappeda, pemerintah desa, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis Basanohi). Keterlibatan multipihak ini sebenarnya merupakan prasyarat penting dalam tata kelola destinasi wisata sebagaimana telah diulas oleh Handayani & Warsono (2017) bahwa kolaborasi adalah fondasi pengembangan destinasi pariwisata modern.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa relasi antar-stakeholder masih bersifat parsial dan belum terbangun secara sistematis. Perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya diikuti oleh keselarasan implementasi di tingkat desa. Hal ini tampak dari kurangnya sosialisasi program pengembangan wisata dan minimnya koordinasi teknis di lapangan. Kondisi serupa juga dilaporkan oleh Ginting et al. (2020), yang menyebutkan bahwa lemahnya konsolidasi kebijakan antara tingkat kabupaten dan desa sering menjadi penyebab stagnasi perkembangan destinasi wisata. Peran Pokdarwis Basanohi sebagai penggerak utama pengelolaan wisata di tingkat desa juga belum optimal. Kelompok ini masih menghadapi keterbatasan SDM, terutama dalam hal manajemen wisata, pengelolaan fasilitas, dan promosi digital. Padahal, Ikhlās & Agustar (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan destinasi wisata berbasis komunitas sangat ditentukan oleh kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola atraksi dan layanan wisata. Ketika SDM lokal tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan memadai, maka pengelolaan destinasi akan berjalan tidak efektif.

Selain itu, partisipasi masyarakat sekitar dalam pengelolaan Pantai Waka masih belum merata. Masih banyak masyarakat yang belum terlibat dalam pengambilan keputusan atau dalam aktivitas operasional seperti pengelolaan kebersihan, penyediaan jasa wisata, atau pemeliharaan fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat belum berjalan seutuhnya, meski literatur menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberlanjutan pariwisata (Nandi, 2016; Syaifudin & Ma'ruf, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur kelembagaan yang ada sebenarnya sudah memadai secara formal, tetapi belum berjalan optimal secara fungsional. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan institusional yang meliputi peningkatan kapasitas SDM, penguatan mekanisme koordinasi

antarinstansi, serta penyusunan SOP pengelolaan wisata yang lebih jelas.

Analisis SWOT dan Implikasi Strategi Pengembangan

Analisis SWOT yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan gambaran komprehensif mengenai posisi strategis Pantai Waka dalam konteks pengembangan pariwisata daerah. Hasil perhitungan IFAS menunjukkan bahwa kekuatan internal lebih dominan dibandingkan kelemahannya, yang mengindikasikan bahwa kawasan memiliki modal kuat untuk dikembangkan. Modal ini meliputi keindahan alam, dukungan regulasi, antusiasme masyarakat, serta keberadaan Pokdarwis yang sudah terbentuk. Temuan ini selaras dengan penelitian Sari & Kagungan (2016) yang menegaskan bahwa kekuatan internal menjadi faktor pendorong utama percepatan pembangunan destinasi.

Sementara itu, hasil EFAS menunjukkan bahwa peluang eksternal lebih besar dibandingkan ancaman, yang mengindikasikan bahwa lingkungan eksternal sangat mendukung pengembangan Pantai Waka. Peluang tersebut mencakup tren peningkatan wisata bahari, perkembangan teknologi pemasaran digital, serta potensi kerja sama antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Studi Rinaldi & Hema (2024) menyebutkan bahwa kolaborasi multipihak dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal.

Namun demikian, beberapa ancaman tetap perlu diantisipasi, antara lain kerusakan lingkungan pesisir, persaingan antar-destinasi regional, serta rendahnya kedisiplinan wisatawan terhadap kebersihan. Ancaman ini sejalan dengan kekhawatiran Triyono & Nugroho (2023) bahwa destinasi bahari sangat rentan terhadap degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan pendekatan berkelanjutan. Oleh karenanya, pengembangan Pantai Waka harus mengadopsi prinsip ekowisata yang mengedepankan konservasi dan edukasi lingkungan.

Posisi kuadran I pada matriks SWOT mengindikasikan bahwa strategi pengembangan yang paling sesuai adalah strategi agresif atau progresif. Artinya, kekuatan yang sudah dimiliki perlu digunakan sepenuhnya untuk menangkap peluang yang tersedia. Strategi ini dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan, antara lain: Memperkuat kelembagaan Pokdarwis melalui pelatihan manajemen wisata, hospitality, pemasaran digital, dan konservasi lingkungan. Mengembangkan promosi digital berbasis media sosial dan platform wisata, sebagaimana direkomendasikan oleh Nugroho et al. (2022), yang menekankan pentingnya pemasaran pariwisata berbasis teknologi. Meningkatkan kualitas fasilitas wisata secara bertahap melalui kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Menerapkan konsep wisata berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah terpadu, edukasi wisatawan, serta penataan zonasi kawasan rawan ekologis. Mendorong skema pendanaan kolaboratif melalui CSR, dana desa, dan kemitraan swasta untuk percepatan pembangunan infrastruktur wisata.

Jika strategi-strategi tersebut dijalankan secara konsisten, Pantai Waka berpotensi besar menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian mengenai keberhasilan desa wisata lainnya (Alfianor et al., 2020; Suryaningsih & Nugraha, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, stakeholder yang terlibat dalam pengembangan Wisata Pantai Waka Desa Fatkoyun diklasifikasikan menjadi 5 (lima) elemen yang tergabung antara lain Bappeda Kabupaten Kepulauan Sula, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Basanohi) juga Masyarakat Desa. Berdasarkan pemetaan Stakeholder 5 instansi tersebut tergabung dalam kuadran berdasarkan hasil pembobotan yaitu Kuadran I terdapat Bapeda dan Kuadran II Dinas Pariwisata, dan Kelompok Sadar Wisata (Basanohi), Kuadran III Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kep. Sula dan dikuadran IV terdapat Masyarakat. Strategi progresif merupakan strategi yang dihasilkan berdasarkan perhitungan SWOT dimana total skor kekuatan lebih besar dibandingkan total skor kelemahan, berarti pengembangan wisata Pantai Waka mempunyai kekuatan lebih untuk ditingkatkan. Untuk total skor peluang juga lebih besar dibandingkan total skor ancaman ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Wisata Pantai Waka tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dalam pengembangan Objek Wisata Pantai waka di perlukan mindset pemerintah yang lebih fokus terhadap pariwisata seperti adanya kerja sama dengan instansi terkait serta di dukung dengan alokasi dana pemerintah daerah yang memadai untuk keberlangsungan pengembangan Objek Wisata Pantai Waka kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianor, R., Safitri, N. A., & Hidayati, A. (2020). Identifikasi peran kelembagaan dalam kegiatan pariwisata Kabupaten Tabalong. *Ruang*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.14710/ruang.6.1.11-18>
- Ginting, A. H., Wardana, D., & Zainal, Z. (2020). Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211–219. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.874>
- Habaora, F., Riwukore, J. R., & Yustini, T. (2021). Kondisi eksisting destinasi pariwisata Pantai Lasiana Kota Kupang berdasarkan atraksi, aksesibilitas, fasilitas, kelembagaan, dan ekosistem pariwisata. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 15(2), 103–115. <https://doi.org/10.47608/jki.v15i22021.103-115>
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40–53. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i3.16543>
- Hidayat, T., & Muchtar, A. (2022). Peran kelembagaan dalam pengembangan Desa Wisata Lamajang Kabupaten Bandung dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal. *Tourism Scientific Journal*, 8(1), 93–104. <https://doi.org/10.32659/tsj.v8i1.230>
- Ikhlas, D., & Agustar, A. (2024). Peran masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata: Studi kasus objek wisata Kapalo Banda Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Niara*, 16(3), 623–631. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/index>
- Nandi, N. (2016). Pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia. *Jurnal Geografi Gea*, 8(1), 33–42. <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/1689>
- Nugroho, A. Y., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). Peran stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 315–335. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i2.33577>
- Rinaldi, R., & Hema, P. (2024). Analysis of the contribution of Bantimurung Bulusaraung Nature Tourism Park to the original regional income (PAD) of Maros Regency.

- Multidisciplinary Journal of Tourism, Hospitality, Sport and Physical Education*, 1(2), 60–69. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80140903>
- Sari, Y. R., & Kagungan, D. (2016). Kebijakan pengembangan kawasan wisata bahari berbasis kearifan lokal dan penguatan kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 14(1), 88–104. <https://doi.org/10.21009/econosains.0141.07>
- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 4(1), 79–96. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i1.895>
- Suryaningsih, O., & Nugraha, J. T. (2018). Peran lembaga desa dalam pengembangan Desa Wisata Wanurejo dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal. *JMAN: Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara*, 2(1), 120–128. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/229>
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44661>
- Triyono, J., & Nugroho, D. Y. (2023). Pengembangan ekowisata bahari Pantai Karang Jahe melalui pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(3), 340–350. <https://doi.org/10.37329/metta.v3i3.2781>
- Wahyuningsasi, E. W. (2022). Analisis strategi pengembangan objek wisata Pantai Bohay pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga). <http://repository.upm.ac.id/id/eprint/4172>